



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten, Telepon: 081314149917  
Website: [satpolpp.bantenprov.go.id](http://satpolpp.bantenprov.go.id), Email: [satpolpp@bantenprov.go.id](mailto:satpolpp@bantenprov.go.id), Kode Pos: 42171

### KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

NOMOR: /KEP. -SATPOL.PP/2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK, DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN, BIAYA LAYANAN INFORMASI, DAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh dan mengakses informasi publik secara berkala, serta merta dan setiap saat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
- b. bahwa dalam rangka penerapan keterbukaan informasi, transparansi keuangan serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu ditetapkan Daftar Informasi Dan Dokumentasi Publik, Daftar Informasi Yang Dikecualikan, Biaya Layanan Informasi, Dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, serta mendukung *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten tentang Penetapan Daftar Informasi Dan Dokumentasi Publik, Daftar Informasi Yang Dikecualikan, Biaya Layanan Informasi, Dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 38);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 63);
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 23);
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 48).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Banten Nomor 489.1/Kep.111-Huk/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK, DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN, BIAYA LAYANAN INFORMASI, DAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026.
- KESATU : Daftar Informasi Dan Dokumentasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Layanan Informasi diberikan secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon dapat melakukan penggandaan/fotocopy dengan biaya sendiri atau menyediakan alat penyimpanan salinan digital untuk perekaman data.
- KEEMPAT : Maklumat Pelayanan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang  
pada tanggal : Januari 2026

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI BANTEN**

**ttd**

**NANA SURYANA, ST., M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP 19710624 199803 1 006

Tembusan Yth.:

1. Gubernur Banten;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
3. Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 PROVINSI BANTEN  
 NOMOR: /KEP. -SATPOL.PP/2026 TENTANG  
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 PUBLIK, DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN,  
 BIAYA LAYANAN INFORMASI, DAN MAKLUMAT  
 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026

**DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN  
 TAHUN 2026**

No.	Nama Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Keputusan	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A.</b>	<b>INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA</b>							
<b>1.</b>	<b>Informasi tentang Profil Badan Publik</b>							
1.1	Kedudukan/domisili beserta alamat lengkap	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN Alamat: Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kec.Curug, Kota Serang Telepon: 081314149917 Email: satpolpp@bantenprov.go.id Website: satpolpp.bantenprov.go.id Instagram: Satpolpp.provbanten Youtube:	Kasubag Umpeg	Sekretaris	Perbaharui 2026	online	Selama berlaku	Website

No.	Nama Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Keputusan	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	Visi Dan Misi	Terdepan dalam menciptakan Trantibum, Penegakan Peraturan Daerah Dan Kepala Daerah. Terwujudnya Polisi Pamong Praja yang handal tangguh dan Profesional.	Kasubag Umpeg	Sekretaris	Perbaharui 2026	online/softcopy	Selama berlaku	Website
1.3	Tugas & Fungsi	Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah.	Kasubag Umpeg	Sekretaris	Perbaharui 2026	online/softcopy	Selama berlaku	Website
1.4	Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang & Fungsi	Tertuang dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten	Kasubag Umpeg	Sekretaris	Perbaharui 2026	online/softcopy	Selama berlaku	Website
1.5	Profil Kepala Satuan	Biodata Kasatpol PP Provinsi Banten	Kasubag Umpeg	Sekretaris	2026	online/softcopy	Selama Berlaku	Website
1.6	Profil Pejabat	Komposisi Pejabat pada Satpol PP Provinsi Banten	Kasubag Umpeg	Sekretaris	Perbaharui 2026	online/softcopy	Selama berlaku	Website
1.7	LHKPN	LHKPN Kepala Satuan serta Pejabat lainnya yang telah di verifikasi/diperiksa KPK.	Kasubag Umpeg	Sekretaris	Perbaharui 2026	online/softcopy	Selama berlaku	Website
1.8	SK PPID	Penetapan Tim Pelaksana PPID Satpol PP Provinsi Banten	Kasubag Umpeg	Sekretaris	2026	online/softcopy	Selama Berlaku	Website
1.9	SK Pengaduan	Penetapan Tim Pengelola Pengaduan Satpol PP Provinsi Banten	Kasubag Umpeg	Sekretaris	2026	online/softcopy	Selama Berlaku	Website
1.10	Laporan Layanan Informasi Publik	Keterbukaan Informasi Publik	Kasubag Umpeg	Sekretaris	2026	online/softcopy	1 tahun	Website
<b>2.</b>	<b>Ringkasan Informasi tentang Program/Kegiatan yang sedang dilaksanakan</b>							
2.1	Nama Program & Kegiatan	Daftar nama program & kegiatan tertuang dalam DPA	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	2026	online/softcopy	1 tahun	Website
2.2	Penanggung jawab & Pelaksana Program	Penanggung jawab & pelaksana program & kegiatan tertuang dalam DPA	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	2026	online/softcopy	1 tahun	Website
2.3	Target & Capaian Program/Kegiatan	Target & capaian program & kegiatan tertuang dalam DPA	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	2026	online/softcopy	1 tahun	Website

2.4	Jadwal Pelaksanaan Program/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan program & kegiatan tertuang dalam DPA	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	2026	online/softcopy	1 tahun	Website
2.5	Nilai Anggaran Kegiatan per Program	Nilai anggaran program & kegiatan tertuang dalam DPA	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	2026	online/softcopy	1 tahun	Website
2.6	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU) pelaksanaan kegiatan	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	2026	online/softcopy	1 tahun	Website
2.7	Perjanjian Kinerja (Perkin)	Perjanjian Kinerja (Perkin) oleh Penanggung jawab & Pelaksana Program/Kegiatan	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	2026	online/softcopy	1 tahun	Website
2.8	Daftar Informasi Publik	Informasi yang dipublikasikan, maklumat pelayanan dan informasi yang dikecualikan.	Kasubag Umpeg	Sekretaris	2026	online/softcopy	1 tahun	Website

No.	Nama Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Keputusan	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3.</b>	<b>Ringkasan Kinerja yang telah maupun sedang dilaksanakan</b>							
3.1	Penilaian Kinerja	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) meliputi kinerja, akuntabilitas, efisiensi, kegiatan yang telah dilaksanakan dan penggunaan anggaran.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	2026	online/softcopy	1 tahun	Website
3.2	Disiplin Pegawai	Data Pelanggaran Kedisiplinan Pegawai Satpol PP Provinsi Banten	Kasubag Umpeg	Sekretaris	Perbaharui 2026	online/softcopy	Selama berlaku	Website
<b>4.</b>	<b>Ringkasan Laporan Keuangan</b>							
4.1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.	Kasubag Umpeg/Perencana Ahli Muda	Sekretaris	2026	online/softcopy	1 tahun	Website
4.2	Neraca	Neraca adalah bagian dari sebuah laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional organisasi, dan modal pada waktu tertentu.	Kasubag Umpeg/Perencana Ahli Muda	Sekretaris	2026	online/softcopy	1 tahun	Website

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3	Daftar Aset	Ringkasan aset yang dimiliki.	Kasubag Umpeg	Sekretaris	2026	online/softcopy	1 tahun	Website
4.4	Laporan Realisasi Fisik dan Anggaran	Rincian laporan penyerapan anggaran	Kasubag Umpeg	Sekretaris	2026	online/softcopy	1 tahun	Website
<b>5. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik</b>								
5.1	Permohonan informasi publik	Bagan alur, syarat dan waktu permohonan informasi/pengajuan keberatan dan pihak-pihak bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Kasubag Umpeg	PPID Pelaksana	Perbaharui 2026	online/softcopy	Selama berlaku	website
5.2	Pengajuan keberatan	Bagan alur, syarat dan waktu permohonan informasi/pengajuan keberatan dan pihak-pihak bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Kasubag Umpeg	PPID Pelaksana	Perbaharui 2026	online/softcopy	Selama berlaku	website
5.3	Permohonan penyelesaian sengketa informasi	Bagan alur, syarat dan waktu permohonan informasi/pengajuan keberatan dan pihak-pihak bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Kasubag Umpeg	PPID Pelaksana	Perbaharui 2026	online/softcopy	Selama berlaku	website
5.4	Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP) Informasi Publik	Bagan alur, syarat dan waktu permohonan informasi/pengajuan keberatan dan pihak-pihak bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Kasubag Umpeg	PPID Pelaksana	Perbaharui 2026	online/softcopy	Selama berlaku	website
5.5	Pengaduan	Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, Sampaikan laporan Anda langsung kepada instansi pemerintah berwenang melalui Lapor.go.id/ Sentra Pelayanan Pengaduan Satpol PP Provinsi Banten (Sayap Malik).	Kasubag Umpeg	PPID Pelaksana	Perbaharui 2026	online/softcopy	Selama berlaku	website

No.	Nama Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Keputusan	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B. INFORMASI YANG SERTA MERTA</b>								
<b>1. Informasi Penting</b>								
1.1	Nomor telepon penting	Daftar informasi telepon penting di Provinsi Banten	Kasubag Umpeg	PPID Pelasana	Perbaharui 2026	online	Selama berlaku	website
1.2	Sentra Pelayanan Pengaduan & Informasi Publik	Pusat layanan permintaan informasi dan pengaduan Satpol PP Provinsi Banten	Kasubag Umpeg	PPID Pelasana	Perbaharui 2026	online	Selama berlaku	website
1.3	Informasi prakiraan cuaca Provinsi Banten	Prakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten	Kasubag Umpeg	PPID Pelasana	Perbaharui 2026	online	Selama berlaku	website
1.4	Informasi Bencana Daerah	Daerah yang terdampak bencana di wilayah Provinsi Banten	Kasubag Umpeg	PPID Pelasana	Perbaharui 2026	online	Selama berlaku	website
1.5	Informasi pencegahan DBD	Pencegahan akan bahaya demam berdarah	Kasubag Umpeg	PPID Pelasana	Perbaharui 2026	online	Selama berlaku	website
<b>2. Mitigasi Bencana</b>								
2.1	Kebakaran	Tata cara penyelamatan dari bahaya kebakaran	Kasubag Umpeg	PPID Pelasana	Perbaharui 2026	online	Selama berlaku	website
2.2	Gempa Bumi	Tata cara penyelamatan dari bahaya kebakaran	Kasubag Umpeg	PPID Pelasana	Perbaharui 2026	online	Selama berlaku	website
No.	Nama Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Keputusan	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>C. INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT</b>								
1	Renstra	Rencana Strategis Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023 s.d 2026	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	Perbaharui 2026	online/ softcopy	1 tahun	Website
2	SOP Pengumpulan Data Kinerja	Standar Operasional Prosedur Data Kinerja	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	Perbaharui 2026	online/ softcopy	1 tahun	Website
3	Statistik Sektoral	Data sektoral untuk bahan perencanaan	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	Perbaharui 2026	online/ softcopy	1 tahun	Website
4	RKPD Provinsi Banten	Rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Banten Tahun 2024	Kasubag Umpeg	Sekretaris	Perbaharui 2026	online/ softcopy	1 tahun	Website
5	Data PPNS Pemerintah Provinsi Banten	Seluruh PPNS yang berada di OPD Pemerintah Provinsi Banten	Kasi Penyelidikan Penyidikan	Sekretaris	Perbaharui 2026	online/ softcopy	1 tahun	Website

6	Struktur PPID Pelaksana Satpol PP Provinsi Banten	Tata laksana PPID pada Satpol PP Provinsi Banten	Kasubag Umpeg	Sekretaris	Perbaharui 2026	<i>online/softcopy</i>	1 tahun	Website
7	Rencana Aksi	Program rencana dan sub kegiatan Satpol PP Provinsi Banten	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	Perbaharui 2026	<i>online/softcopy</i>	1 tahun	Website
8	Profil Satuan	Rangkuman visi misi, sarpras, tupoksi jumlah kekuatan anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sekretaris	2026	<i>online/softcopy</i>	Selama Berlaku	Website
9	Renja	Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	Perbaharui 2026	<i>online/softcopy</i>	Selama Berlaku	Website
10	Maklumat Pelayanan	Bentuk pelayanan publik Satpol PP Provinsi Banten.	Kasubag Umpeg	Sekretaris	Perbaharui 2026	<i>online/softcopy</i>	1 tahun	Website

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI BANTEN**

**ttd**

**NANA SURYANA, ST., M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP 19710624 199803 1 006

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 PROVINSI BANTEN  
 NOMOR: /KEP. -SATPOL.PP/2026 TENTANG  
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 PUBLIK, DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN,  
 BIAYA LAYANAN INFORMASI, DAN MAKLUMAT  
 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN  
 TAHUN 2026**

No.	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
			Akibat Info Dibuka	Akibat Info Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Informasi yang mengungkapkan Informasi Pribadi a. Data Kepegawaian b. Data Pribadi Pelaku Usaha c. Data Pelanggar Perda Perkada	1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 2. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf h, huruf i, huruf j.	1. Mengungkap data pribadi; 2. Melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.	Tidak terbatas.
2.	Informasi yang mengungkap proses pemeriksaan internal: • Data-data terkait proses pemeriksaan reguler, pemeriksaan kasus	1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.	Sampai menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan.

No.	Jenis Informasi	Daerah.	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
		Dasar Hukum	Akibat Info Dibuka	Akibat Info Ditutup	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
3	Informasi yang mengungkap proses penegakan hukum: a. Jadwal dan rencana kegiatan Operasi Yustisi dan Non Yustisi; b. Informasi terkait kasus yang masih dalam proses ranah hukum; c. Data terkait proses penyelidikan dan penyidikan tindak pelanggaran Perda/Perkada dan Operasi Non Yustisi	1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;	Menghambat proses penegakan hukum, seperti penghilangan barang bukti.	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum.	Sampai dengan proses penegakan hukum selesai.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI BANTEN**

ttd

**NANA SURYANA, ST., M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP 19710624 199803 1 006

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN  
NOMOR: /KEP. -SATPOL.PP/2026  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PUBLIK, DAFTAR INFORMASI YANG  
DIKECUALIKAN, BIAYA LAYANAN  
INFORMASI, DAN MAKLUMAT  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN  
2026

**MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN**

Informasi Publik merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku PPID Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, kami berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen untuk:

1. Memberikan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
3. Dalam memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat;
4. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan layanan Informasi Publik.

Kami sanggup menyelenggarakan Informasi Publik sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI BANTEN**

**ttd**

**NANA SURYANA, ST., M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP 19710624 199803 1 006